



Balai Kota

Sambungan Hal 9

"Rencana perkantoran di kompleks Balaikota maupun diluar Balaikota bebas rokok sedang dipersiapkan. Termasuk soal penyediaan tempat khusus merokoknya harus dibicarakan dengan DBGAD (Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah)," jelasnya.

Penambahan tempat khusus merokok, katanya menjadi keharusan sebagai konsekuensi larangan merokok di perkantoran. Untuk penyediaan tempat khusus merokok, Pemkot katanya juga akan meminta bantuan provinsi. "Karena provinsi juga dapat kompensasi dari pajak tembakau," ucapnya.

Diakuinya untuk menambah tempat khusus merokok, bukan perkara mudah. Sebab Pemkot harus mencari lokasi baru. "Kondisi perkantoran juga sempit," ujarnya.

Wali Kota Haryadi Suyuti mendukung upaya tersebut. Namun demikian Haryadi mengaku akan mewujudkan kawasan bebas rokok di Balai Kota secara bertahap.

"Prioritas utama ada di ruang rapat dan ruang untuk pelayanan publik. Dua kawasan tersebut harus menjadi prioritas utama kampanye bebas asap rokok," kata Haryadi.

Untuk ruang pribadi, Haryadi menegaskan bahwa itu tetap akan menjadi perhatian namun tidak untuk saat ini. Ruang pribadi masih ditoleransi untuk merokok namun harus dilengkapi *ekshaust*.

"Prinsipnya perokok harus menghargai mereka yang tidak merokok," tegasnya.

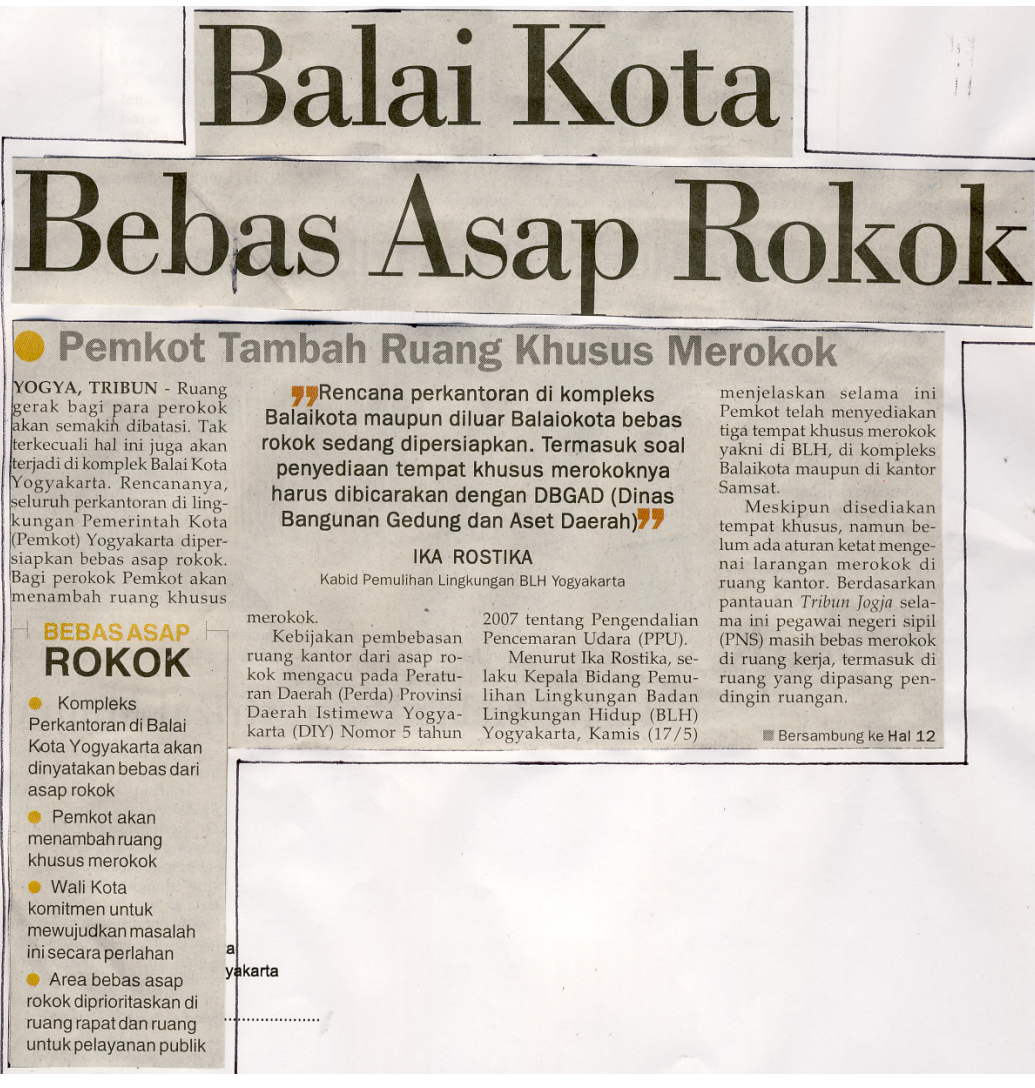
Upaya mengurangi kebiasaan merokok PNS di lingkungan Pemkot, selama ini

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta juga menyediakan klinik konsultasi berhenti merokok di kompleks Balaikota. Namun menurut Kepala Dinkes Yogyakarta, Tuty Setyowati rata-rata dalam satu bulan hanya satu orang yang menggunakan fasilitas layanan tersebut.

Meski bisa dikatakan sepi peminat, Tuty tetap mempertahankan klinik tersebut. "Keinginan berhenti merokok ini kan butuh kesadaran sendiri," katanya.

Karena klinik berhenti merokok di Pemkot dikosongkan lantaran akan direhab, sementara klinik konsultasi berhenti merokok dipindah ke Puskesmas Umbulharjo II.

"Di luar Pemkot Dinkes juga menyediakan klinik konsultasi berhenti merokok di puskesmas untuk melayani masyarakat," katanya. (evn)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005